



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 59 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN MANDAT DAN DELEGASI PENANDATANGANAN NASKAH DINAS  
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan pelayanan di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu dilakukan pelimpahan kewenangan dalam bentuk mandat dan delegasi dalam penandatanganan naskah dari Gubernur Jawa Barat kepada pejabat di bawah 1 (satu) tingkat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Mandat dan Delegasi Penandatanganan Naskah Dinas Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 253);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 254);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN MANDAT DAN DELEGASI PENANDATANGANAN NASKAH DINAS URUSAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat;
2. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat;
7. Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Gubernur kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.
8. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

9. Naskah Dinas Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang selanjutnya disebut Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dalam bentuk dan susunan produk hukum yaitu Keputusan Gubernur dan surat.

#### Pasal 2

- (1) Gubernur selaku Pejabat Pembina Perpustakaan dan Pencipta Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi berwenang menandatangani Naskah Dinas.
- (2) Gubernur memberikan Mandat dan Delegasi atas kewenangan penandatanganan Naskah Dinas Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya; dan
  - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Pemberian Mandat dan Delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 10 Juli 2023  
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 10 Juli 2023  
SEKERTARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARATTAHUN 2023 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

Dr. TEPPY WAWAN DHARMAWAN, S.H.  
Pembina Utama Muda

## LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 59 TAHUN 2023

TANGGAL : 4 September 2023

TENTANG : PEMBERIAN MANDAT DAN DELEGASI  
PENANDATANGANAN NASKAH DINAS  
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG  
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN.

## MANDAT DAN DELEGASI PENANDATANGANAN NASKAH DINAS URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

No.	Manajemen Bidang Perustakaan Dan Kearsipan	Jenis Pelimpahan Kewenangan	Penerima	Bentuk Naskah Dinas Penetapan	Dasar Pertimbangan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
I	SEKRETARIAT					
1	Pembentukan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Delegasi	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Keputusan Gubernur	Berlaku di internal dinas dan Tidak termasuk naskah dinas penetapan urusan Pemerintah yang bersifat strategis	
2	Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Delegasi	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Keputusan Gubernur	Berlaku di internal dinas dan Tidak termasuk naskah dinas penetapan urusan Pemerintah yang bersifat strategis	
3	Penetapan Tenaga Teknis Pelaksana	Delegasi	Kepala Dinas Perpustakaan dan	Keputusan Gubernur	Tidak termasuk naskah dinas	

No.	Manajemen Bidang Perustakaan Dan Kearsipan	Jenis Pelimpahan Kewenangan	Penerima	Bentuk Naskah Dinas Penetapan	Dasar Pertimbangan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	Kegiatan Di Lingkungan DISPUSIPDA Provinsi Jawa Barat		Kearsipan Daerah		penetapan urusan Pemerintah yang bersifat strategis	
4	Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat	Delegasi	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Keputusan Gubernur	Tidak termasuk naskah dinas penetapan urusan Pemerintah yang bersifat strategis	
5	Penunjukan penanggung jawab/Pemegang kendaraan Dinas	Delegasi	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Keputusan Gubernur	Berlaku di internal dinas dan Tidak termasuk naskah dinas penetapan urusan Pemerintah yang bersifat strategis	
6	Ketetapan Pemberian Makanan Ringan Bergizi Untuk Meningkatkan Kesehatan Berupa <i>Extra Fooding</i> Bagi Sumber Daya Manusia Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Delegasi	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Keputusan Gubernur	Berlaku di internal dinas dan Tidak termasuk naskah dinas penetapan urusan Pemerintah yang bersifat strategis	
7	Penunjukkan Pejabat	Delegasi	Kepala Dinas	Keputusan Gubernur	Tidak termasuk	

No.	Manajemen Bidang Perustakaan Dan Kearsipan	Jenis Pelimpahan Kewenangan	Penerima	Bentuk Naskah Dinas Penetapan	Dasar Pertimbangan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat		Perpustakaan dan Kearsipan Daerah		naskah dinas penetapan urusan Pemerintah yang bersifat strategis	
6	Penunjukkan Pejabat Pengadaan Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat	Delegasi	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Keputusan Gubernur	Tidak termasuk naskah dinas penetapan urusan Pemerintah yang bersifat strategis	
7	Pengangkatan Pejabat Pelaksana Harian	Delegasi	Sekretaris Daerah dan/atau Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Keputusan Gubernur	Tidak termasuk naskah dinas penetapan urusan Pemerintah yang bersifat strategis	
8	Penetapan Tenaga Pengelola Arsip	Delegasi	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Keputusan Gubernur	Tidak termasuk naskah dinas penetapan urusan Pemerintah yang bersifat strategis	
9	Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (Ppk) Dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Pptk) Di Lingkungan Dinas Perpustakaan	Delegasi	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Keputusan Gubernur	Tidak termasuk naskah dinas penetapan urusan Pemerintah yang bersifat strategis	

No.	Manajemen Bidang Perustakaan Dan Kearsipan	Jenis Pelimpahan Kewenangan	Penerima	Bentuk Naskah Dinas Penetapan	Dasar Pertimbangan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	Dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat					
10	Pengelola Sistem Akuntansi Instansi Dana Dekonsentrasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat	Delegasi	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Keputusan Gubernur	Tidak termasuk naskah dinas penetapan urusan Pemerintah yang bersifat strategis	
11	Penetapan Pejabat Pengelola Dana Dekonsentrasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat	Delegasi	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Keputusan Gubernur	Tidak termasuk naskah dinas penetapan urusan Pemerintah yang bersifat strategis	
12	Penetapan Urusan Kesekretariatan yang bersifat internal lainnya yang berlaku di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat	Delegasi	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Keputusan Gubernur	Tidak termasuk naskah dinas penetapan urusan Pemerintah yang bersifat strategis	

No.	Manajemen Bidang Perustakaan Dan Kearsipan	Jenis Pelimpahan Kewenangan	Penerima	Bentuk Naskah Dinas Penetapan	Dasar Pertimbangan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
II URUSAN KEARSIPAN						
1	Penetapan Panitia Penilai Arsip Yang Dimusnahkan dan Diserahkan	Delegasi	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Keputusan Gubernur	Tidak termasuk naskah dinas penetapan urusan Pemerintah yang bersifat strategis	
2	Penetapan arsip yang akan dimusnahkan	Delegasi	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Keputusan Gubernur	Tidak termasuk naskah dinas penetapan urusan Pemerintah yang bersifat strategis	
3	Penetapan arsip yang akan diserahkan	Delegasi	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Keputusan Gubernur	Tidak termasuk naskah dinas penetapan urusan Pemerintah yang bersifat strategis	
4	Penetapan Tim Pengawas Kearsipan Internal dan Eksternal	Delegasi	Sekretaris Daerah	Keputusan Gubernur	Tidak termasuk naskah dinas penetapan urusan Pemerintah yang bersifat strategis	
5	Penetapan Hasil Pengawasan Kearsipan Internal	Delegasi	Sekretaris Daerah	Keputusan Gubernur	Tidak termasuk naskah dinas penetapan urusan Pemerintah yang bersifat strategis	
6	Penetapan Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal	Delegasi	Sekretaris Daerah	Keputusan Gubernur	Tidak termasuk naskah dinas penetapan urusan	

No.	Manajemen Bidang Perustakaan Dan Kearsipan	Jenis Pelimpahan Kewenangan	Penerima	Bentuk Naskah Dinas Penetapan	Dasar Pertimbangan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
					Pemerintah yang bersifat strategis	
7	Penetapan Arsip Statis	Delegasi	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Keputusan Gubernur	Tidak termasuk naskah dinas penetapan urusan Pemerintah yang bersifat strategis	
8	Penetapan Autentikasi Arsip Dinamis dan Statis Hasil Alih Media Arsip	Delegasi	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Keputusan Gubernur	Tidak termasuk naskah dinas penetapan urusan Pemerintah yang bersifat strategis	
9	Penetapan Arsip vital Di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat	Delegasi	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Keputusan Gubernur	Tidak termasuk naskah dinas penetapan urusan Pemerintah yang bersifat strategis	
10	Penetapan Pencipta Arsip, Unit Pengolah dan Unit Kearsipan Di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat	Delegasi	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Keputusan Gubernur	Tidak termasuk naskah dinas penetapan urusan Pemerintah yang bersifat strategis	
11	Penetapan Tim Pengelola Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) Di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan	Delegasi	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Keputusan Gubernur	Tidak termasuk naskah dinas penetapan urusan Pemerintah yang bersifat strategis	

No.	Manajemen Bidang Perustakaan Dan Kearsipan	Jenis Pelimpahan Kewenangan	Penerima	Bentuk Naskah Dinas Penetapan	Dasar Pertimbangan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat					
12	Penetapan Daftar Pencarian Arsip Statis	Delegasi	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Keputusan Gubernur	Tidak termasuk naskah dinas penetapan urusan Pemerintah yang bersifat strategis	
13	Penetapan Tim Pembinaan Kearsipan	Delegasi	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Keputusan Gubernur	Tidak termasuk naskah dinas penetapan urusan Pemerintah yang bersifat strategis	
14	Penetapan Pemberian Penghargaan kearsipan	Delegasi	Sekretaris Daerah	Keputusan Gubernur	Tidak termasuk naskah dinas penetapan urusan Pemerintah yang bersifat strategis	
15	Penetapan perjanjian kerja kearsipan dengan Pihak Lain	Delegasi	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Keputusan Gubernur	Tidak termasuk naskah dinas penetapan urusan Pemerintah yang bersifat strategis	
16	Penetapan status arsip statis	Delegasi	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Keputusan Gubernur	Tidak termasuk naskah dinas penetapan urusan Pemerintah yang bersifat strategis	
17	Penetapan Pemberian Penghargaan diberikan kepada	Delegasi	Sekretaris Daerah	Keputusan Gubernur	Tidak termasuk naskah dinas penetapan urusan	

No.	Manajemen Bidang Perustakaan Dan Kearsipan	Jenis Pelimpahan Kewenangan	Penerima	Bentuk Naskah Dinas Penetapan	Dasar Pertimbangan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	masyarakat yang memberitahukan keberadaan dan/atau menyerahkan arsip statis yang masuk dalam DPA kepada lembaga kearsipan				Pemerintah yang bersifat strategis	
18	Penetapan autentisitas arsip statis	Delegasi	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Keputusan Gubernur	Tidak termasuk naskah dinas penetapan urusan Pemerintah yang bersifat strategis	
19	Pembentukan simpul jaringan yang diselenggarakan oleh lembaga kearsipan Provinsi Jawa Barat	Delegasi	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Keputusan Gubernur	Tidak termasuk naskah dinas penetapan urusan Pemerintah yang bersifat strategis	
20	Pembentukan Tim Pembina simpul jaringan kabupaten/kota	Delegasi	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Keputusan Gubernur	Tidak termasuk naskah dinas penetapan urusan Pemerintah yang bersifat strategis	
21	Penetapan Urusan Kearsipan lainnya yang bersifat internal lainnya yang berlaku di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat	Delegasi	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Keputusan Gubernur	Tidak termasuk naskah dinas penetapan urusan Pemerintah yang bersifat strategis	

No.	Manajemen Bidang Perustakaan Dan Kearsipan	Jenis Pelimpahan Kewenangan	Penerima	Bentuk Naskah Dinas Penetapan	Dasar Pertimbangan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
III.	Urusan Perpustakaan					
1	Pembentukan Panitia Lomba Perpustakaan	Delegasi	Sekretaris Daerah	Keputusan Gubernur	Tidak termasuk naskah dinas penetapan urusan Pemerintah yang bersifat strategis	
2	Pembentukan Panitia Lomba Duta Baca	Delegasi	Sekretaris Daerah	Keputusan Gubernur	Tidak termasuk naskah dinas penetapan urusan Pemerintah yang bersifat strategis	
3	Pembentukan Tim Penilai Akreditasi Perpustakaan Umum	Delegasi	Sekretaris Daerah	Keputusan Gubernur	Tidak termasuk naskah dinas penetapan urusan Pemerintah yang bersifat strategis	
4	Penetapan Hasil Penilaian Akreditasi Perpustakaan Umum	Delegasi	Sekretaris Daerah	Keputusan Gubernur	Tidak termasuk naskah dinas penetapan urusan Pemerintah yang bersifat strategis	
5	Penetapan pengawas, dan evaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan	Delegasi	Sekretaris Daerah	Keputusan Gubernur	Tidak termasuk naskah dinas penetapan urusan Pemerintah yang bersifat strategis	
6	Penetapan Tenaga Teknis Perpustakaan	Delegasi	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Keputusan Gubernur	Tidak termasuk naskah dinas penetapan urusan	

No.	Manajemen Bidang Perustakaan Dan Kearsipan	Jenis Pelimpahan Kewenangan	Penerima	Bentuk Naskah Dinas Penetapan	Dasar Pertimbangan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
					Pemerintah yang bersifat strategis	
7	Penetapan Dewan Perpustakaan Provinsi atas usul kepala perpustakaan provinsi	Delegasi	Sekretaris Daerah	Keputusan Gubernur	Tidak termasuk naskah dinas penetapan urusan Pemerintah yang bersifat strategis	
8	Penetapan Taman Bacaan Masyarakat Dan Rumah Baca Untuk Menunjang Pembudayaan Kegemaran Membaca	Delegasi	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Keputusan Gubernur	Tidak termasuk naskah dinas penetapan urusan Pemerintah yang bersifat strategis	
9	Penetapan Pemberian Penghargaan Kepada Masyarakat Yang Berhasil Melakukan Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca	Delegasi	Sekretaris Daerah	Keputusan Gubernur	Tidak termasuk naskah dinas penetapan urusan Pemerintah yang bersifat strategis	
10	Penetapan Naskah Kuno sebagai Koleksi Perpustakaan Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat	Delegasi	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Keputusan Gubernur	Tidak termasuk naskah dinas penetapan urusan Pemerintah yang bersifat strategis	
11	Penetapan Pemberian Penghargaan Terhadap Masyarakat yang berjasa	Delegasi	Sekretaris Daerah	Keputusan Gubernur	Tidak termasuk naskah dinas penetapan urusan Pemerintah yang	

No.	Manajemen Bidang Perustakaan Dan Kearsipan	Jenis Pelimpahan Kewenangan	Penerima	Bentuk Naskah Dinas Penetapan	Dasar Pertimbangan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimiliki				bersifat strategis	
12	Penetapan Standar Pelayanan Perpustakaan	Delegasi	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Keputusan Gubernur	Tidak termasuk naskah dinas penetapan urusan Pemerintah yang bersifat strategis	
13	Penetapan Standar Tenaga Perpustakaan	Delegasi	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Keputusan Gubernur	Tidak termasuk naskah dinas penetapan urusan Pemerintah yang bersifat strategis	
14	Penetapan Tim Pembina Dan Pengembangan Kompetensi, Profesionalitas Pustakawan Dan Tenaga Teknis Perpustakaan	Delegasi	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Keputusan Gubernur	Tidak termasuk naskah dinas penetapan urusan Pemerintah yang bersifat strategis	
15	Penetapan Kerjasama Perpustakaan	Delegasi	Sekretaris Daerah	Keputusan Gubernur	Tidak termasuk naskah dinas penetapan urusan Pemerintah yang bersifat strategis	
16	Penetapan Urusan Perpustakaan lainnya yang bersifat internal	Delegasi	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	Keputusan Gubernur	Tidak termasuk naskah dinas penetapan urusan	

No.	Manajemen Bidang Perustakaan Dan Kearsipan	Jenis Pelimpahan Kewenangan	Penerima	Bentuk Naskah Dinas Penetapan	Dasar Pertimbangan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	lainnya yang berlaku di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat				Pemerintah yang bersifat strategis	

GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMI